

## PENGARUH PERANG PALESTINA DENGAN MESIR TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI

Novelia Subekti, Inez Amanda Aurellia, Debi Setiawati  
IKIP BUDI UTOMO MALANG  
vellyars@gmail.com, inezamanda355@gmail.com, matahariok9@gmail.com

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perang Mesir dan Palestina yang berpengaruh pada politik Mesir. Konflik Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948. Sejak lemahnya kekuatan Islam dan kolonialisasi yang berkembang, perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat menjadi pemicu konflik. Konflik Palestina berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Pada saat itu beberapa kali terjadi perang antara bangsa Arab dengan Israel. Hingga pada tahun 2011 terjadi Arab Spring yang mempengaruhi politik Mesir. Fenomena politik menjadi momentum penting dalam penelitian ini, yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan politik nasional. Mursi sebagai Presiden baru di Mesir setelah Mubarak turun dari jabatan dengan paksa akibat gejolak politik Mesir 2011, Mursi memiliki karakteristik dan pandangan politik yang berbeda dari Mubarak. Hal tersebut dibuktikan dengan perubahan kebijakan luar negeri Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Di era Mubarak, Mesir lebih memilih kebijakan yang dianggap aman dan sesuai perjanjian damai dengan Israel dan Amerika, Camp David. Perubahan kebijakan luar negeri Mesir tersebut menjadi sebuah kasus yang menarik setelah kurun waktu 30 tahun dibawah kepemimpinan Mubarak posisi Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Keputusan Mursi berpihak kepada Palestina tidak lepas dari faktor kedekatan ideologi yang melatarbelakanginya. Lebih lanjut penulis menjelaskan mengenai latar belakang perang Mesir dan Palestina serta dampaknya bagi kebijakan politik nasional.

**Kata Kunci:** Mesir, konflik Arab-Israel, Politik Luar Negeri, Perjanjian Camp David 1979, Politik Internasional

### Pendahuluan

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang saat ini sangat menarik untuk dikaji bagi para pengamat politik hubungan internasional. Salah satunya adalah negara Mesir dan Palestina yang merupakan negara yang berada di Timur Tengah. Kedua negara tersebut sering mengalami konflik hingga terjadi peperangan. Dampak peperangan kedua negara tersebut juga berdampak pada kebijakan politik nasional. Sehingga negara-negara sekitarnya juga terkena imbas peperangan Mesir dan Palestina. Mesir merupakan negeri yang berada di sudut timur laut Afrika. Dan disebelah barat berbatasan dengan Libya, selatan dengan Sudan, utara dengan Laut Tengah (Laut Mediterania), dan di timur dengan jalur Gaza, Israel, dan Laut Merah.

Dengan demikian letak geografis Mesir sangat strategis karena berada pada titik pertemuan dua benua (Asia dan Afrika), sekaligus penghubung Laut Tengah dan Laut Merah yang disambungkan oleh Terusan Suez (Antara News). Sedangkan Palestina berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan sungai Yordan. Mesir adalah negara Arab yang paling banyak penduduknya dibandingkan Palestina, hampir seluruh populasi terpusat disepanjang sungai Nil, terutama Iskandariyah dan Kairo, dan sepanjang Delta Nil dan dekat Terusan Suez. Selain itu letak strategis

Mesir yang digolongkan sebagai negara maju di Afrika, juga sebagai pusat budaya dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur tengah, dengan demikian Mesir memiliki peran dan pengaruh yang besar dalam stabilitas di Timur Tengah dalam berbagai Aspek.

Dalam menjalankan perannya tersebut, Mesir selalu berdiri dijejeran terdepan dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan yang terjadi di timur Tengah. Wilayah Timur Tengah lebih dikenal dengan dinamika politik yang memicu terjadinya konflik. Wilayah yang rawan akan terjadinya konflik adalah Iran, Irak, Mesir, Palestina, Israel dan ada beberapa negara lainnya. Konflik yang lebih disorot di kawasan Timur Tengah, adalah konflik "Israel-Palestina" yang di juluki sebagai konflik abadi. Pengaruh konflik tersebut sangat cepat menyebar ke negara-negara Arab sekitarnya, sehingga Mesir sebagai negara utama disebut-sebut sebagai negara induk bagi negara-negara di wilayah tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa Mesir adalah negara yang paling menentukan dalam mengubah konstelasi politik dunia Arab. Sejarah membuktikan, setiap getaran politik di Mesir pasti memiliki dampak baik secara ekonomi maupun politik keseluruhan kawasan Timur Tengah.

Faktor lain yang mendukung dan menjadikan Mesir sebagai kekuatan utama di Timur Tengah adalah; yang pertama, dari segi politik Mesir memiliki kultur berbeda dengan negara lain. Dimana sistem pemerintahan Mesir yang sering mengalami masa transisi dari masaa ke masa sehingga kekuatan politik oposisi pemerintah dan sistem demokrasi memungkinkan berkembang untuk kestabilan politik di Timur Tengah. Pada tahun 1952, terjadi revolusi yang menumbangkan kekuasaan absolut Raja Farouk. Revolusi yang dipimpin Kolonel Gamal Abdul Nasser itu mengubah system pemerintahan monarki yang berakar dari masa lampau menjadi sebuah pemerintahan modern berbentuk Republik. Mesir menjalankan roda pemerintahan secara dinamis dengan menjanjikan reformasi di segala bidang.

Dengan demikian apabila konflik di negara mesir tidak diatasi maka akan mengakibatkan negara sekitarnya juga terkena dampaknya, salah satunya dalam hal kebijakan politik nasional. Berdasarkan permasalahan tersebut perlu adanya pemahaman mengenai pengaruh yang akan ditimbulkan dalam perang Mesir dan Palestina dalam kebijakan politik luar negeri.

### **Metode**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan dan analisis histori melalui studi kepustakaan dalam pengumpulan data. Data dan informasi yang digunakan dalam penulisan artikel ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis, seperti beberapa penelitian, buku-buku, bahan bacaan, dan jurnal ilmiah lainnya yang terkait dengan pembahasan mengenai Deklarasi Balfour sebagai awal mula Konflik Israel-Palestina.

Data yang telah terkumpul tersebut kemudian diklasifikasikan, diinterpretasikan dan disusun untuk kemudian dianalisis. Dengan menggunakan pendekatan dan analisis historis dan kajian kepustakaan diharapkan mampu menjelaskan mengenai awal mulai konflik Israel-Palestina dapat terjadi.

### **Hasil dan Pembahasan**

Politik luar negeri adalah politik untuk mencapai tujuan nasional dengan mempergunakan segala kekuasaan dan kemampuan yang ada, serta ditujukan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu upaya suatu negara melalui

keseluruhan sikap dan aktivitasnya yang digunakan untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.

Kebijakan luar negeri ditujukan untuk memelihara, menjaga serta mempertahankan kelangsungan hidup bagi suatu negara. Lebih lanjut, menurut Rosenau, apabila kita mengkaji kebijakan luar negeri suatu negara maka akan memasuki fenomena yang luas dan kompleks, meliputi kehidupan internal (internal life) dan kebutuhan eksternal (eksternal needs) termasuk didalamnya adalah kehidupan internal dan eksternal seperti aspirasi, atribut nasional, kebudayaan, konflik kapabilitas, institusi dan aktivitas rutin yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai bangsa-negara (AA Perwita & Yani, 2011, hal. 49).

Dalam hal ini dijelaskan bahwa, politik luar negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David 1979 dan setelah kematian Anwar Sadat 1981 dan di gantikan oleh Husni Mubarak adalah tetap membawa arah politik luar negeri Mesir Condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tetapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu.

Dalam pembuatan keputusan politik Mesir di bawah kepemimpinannya, Mubarak lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan hasil kesepakatan bersama atau konsensus. Selain itu Mubarak Juga mengupayakan dunia Arab bersedia menerima kehadiran Mesir kembali dengan melakukan serangkaian langkah diplomatik (Antara News).

### **1.1 Sejarah Konflik Palestina**

Konflik Palestina telah berlangsung sejak tahun 1948. Pada awalnya ketika berada dalam kekuasaan Islam, negeri para nabi ini sebagian besarnya berada dalam keadaan aman dan tanpa konflik berkepanjangan. Namun sejak semakin lemahnya kekuatan islam dan kolonialisasi yang terus berkembang, perbedaan keyakinan yang ada di tengah masyarakat menjadi alat pemicu konflik yang cukup strategis. Melalui deklarasi Balbour, Inggris “memberikan” tanah Palestina kepada bangsa Yahudi.

Dengan cara ini, maka Inggris ingin mengurangi persoalan domestik yang terjadi di negaranya akibat ulah orang-orang Yahudi. Maklum, bangsa Yahudi terkenal pintar, tetapi sering membuat masalah. Akibatnya di berbagai negara mereka tidak disukai. Tetapi dengan kondisi itu pula mereka mampu membuat cerita-cerita fiktif yang membuat orang lain menjadi simpatik, misalnya kasus diskriminasi kaum Yahudi di Turki, Eropa dan Kolumbia. Pada masa ini, doktrin-doktrin keagamaan Yahudi sering didengungkan. Bagi kaum Yahudi yang mengklaim diri sebagai orang pilihan (the chosen people), tidak ada jalan untuk menyelamatkan generasi mereka kecuali dengan kembali ke tanah yang telah dijanjikan (the promised land).

Bagi mereka, kejayaan kerajaan Nabi Sulaiman ‘alaihi salam perlu dikembalikan, di mana bekas-bekasnya terletak di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan Orang-orang Yahudi langsung berbondong-bondong kembali ke tanah Palestina. Bahkan ketika sudah semakin kuat, hingga pada tahun 1948, bangsa Yahudi pun mendeklarasikan berdirinya negara Israel. Konflik Palestina pun berkembang menjadi konflik regional bahkan internasional. Pada saat itu, beberapa kali terjadi perang antara bangsa Arab dengan Israel dan sekutunya, meskipun selalu dimenangkan oleh bangsa Yahudi.

Akhirnya, posisi Israel pun semakin kuat, tetapi tetap meninggalkan masalah karena posisi strategis yang dimilikinya. Palestina berada di kawasan Timur Tengah yang menghubungkan benua

Asia, Eropa dan Afrika, dan juga merupakan tempat suci bagi tiga agama samawi. Umat Islam mempunyai masjid Al Aqsa sebagai tempat Rasulullah pernah ber-Isra', kaum Nasrani mempunyai Betlehem sebagai tempat kelahiran Nabi Isa 'alaihi salam, dan kaum Yahudi mengklaim tembok ratapan sebagai peninggalan para nabi mereka. Kondisi ini membuat konflik Israel terus berlangsung, bahkan meluas menjadi konflik agama. Tengah, terutama dalam hubungannya dengan pemerintahan Mesir dan Palestina adalah dengan kelahiran perjanjian Camp David pada tahun 1978.

Perjanjian camp David merupakan perubahan arah politik Mesir pada masa Anwar Sadat yang memperlemah posisi Mesir dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina. Padahal sebelumnya, Gamal Abdul Natsir begitu menunjukkan permusuhan kental dengan Israel, Amerika dan negara kolonial lainnya dengan mendirikan Pan-Arabism. Oleh bangsa Arab ia dianggap sebagai pembawa kejayaan dan kebebasan yang mampu membangkitkan identitas mereka. Nasser bahkan mampu membangun komunikasi intens dengan beberapa negara Arab dalam menentukan sikap mereka terhadap Israel. Mereka menyepakati bahwa tidak boleh ada satu negara Arab pun yang mengakui Israel sebagai negara, serta tidak boleh ada perdamaian dan negosiasi dengan Israel. Ia mampu memunculkan permusuhan dengan bangsa Israel sebagai bangsa non Arab di kawasan Timur Tengah. Apalagi Israel dinilai sebagai perebut wilayah bangsa Arab. Bahkan ia segera menggerakkan bangsa Arab untuk memerangi Israel. Paling tidak beberapa peperangan besar terjadi pada waktu itu seperti perang tahun 1948 dan perang enam hari tahun 1967 melawan Israel.

Amerika tentu tidak menyukai Mesir pada masa ini. Apalagi Natsir menunjukkan kedekatannya dengan Uni Soviet. Pada waktu itu, Soviet yang merupakan musuh Amerika dalam perang dingin mengirimkan berbagai bantuan militer, mulai dari persenjataan, teknologi perang yang canggih, sampai pengiriman lebih dari 10.000 ahli untuk memperkuat militer Mesir. Karenanya pula, militer Mesir tumbuh sebagai kekuatan yang ditakuti di Timur Tengah dan selalu benci dengan Israel. Namun setelah Anwar Sadat memerintah, permusuhan tersebut mulai melemah. Sadat mulai melakukan negosiasi rahasia dengan Israel. Menurutnya, perang hanya akan membuang waktu dan menyebabkan banyak kerugian bagi Mesir.

Akibat perang, lebih dari 10.000 tentara Mesir terbunuh dan 101 pesawat mereka hilang. Bahkan Mesir kehilangan wilayah semenanjung Sinai sejak tahun 1967. Oleh karena itu, ia menilai bahwa jalur diplomasi merupakan cara yang paling murah, termasuk untuk mengembalikan keutuhan wilayah Mesir.

Keinginan Sadat disambut hangat oleh Israel karena Israel pun mulai kewalahan dengan perang. Meskipun menjadi pemenang dalam beberapa kali peperangan dengan bangsa Arab, Perdana Menteri Israel pada waktu itu, Menachem Begin menilai bahwa jalur diplomasi merupakan metode paling murah dan bisa meminimalisir korban dari rakyat dan tentara mereka. Apalagi Amerika meyakinkan bahwa jika Israel bisa berdamai dengan Mesir, maka perang dengan bangsa Arab secara keseluruhan bisa dihentikan. Hal ini dikarenakan posisi Mesir yang dianggap sangat strategis, terutama dalam hal kekuatan militer dan kepemimpinannya terhadap bangsa Arab. Bahkan peta politik Timur Tengah pun segera akan berubah dan menguntungkan Amerika dan Israel.

Melihat kesempatan tersebut, maka presiden Jimmy Charter segera mengambil kebijakan

untuk memfasilitasi perjanjian damai kedua Negara di Camp David, sebuah kota yang terletak 70 miles dari gedung putih di daerah pegunungan Maryland. Oleh karena itu, perjanjian yang diadakan pada tanggal 17 September 1978 ini disebut sebagai perjanjian Camp David. Dalam perjanjian tersebut disepakati beberapa hal yang berkaitan dengan upaya damai kedua Negara.

Beberapa di antaranya adalah bahwa Israel setuju untuk menarik pasukannya dari Semenanjung Sinai dan mengembalikan wilayah tersebut kepada Mesir. Namun sebagai harganya, Mesir harus menjadi negara Arab pertama yang mengakui keberadaan Israel sebagai negara bangsa<sup>13</sup>. Mereka juga sepakat untuk mengakhiri semua bentuk perang dan menyelesaikan semua masalah dengan cara diplomasi.

## **1.2 Hubungan Mesir dan Palestina**

Hubungan antara Mesir dan Palestina telah terjalin cukup lama dan dinamis. Hingga sekarang Mesir tetap menjaga hubungan yang erat dengan Palestina dan mengupayakan perjuangan kemerdekaan Palestina atas pendudukan Israel. Hubungan Mesir dan Palestina terjadi secara bilateral antara Republik Arab Mesir dengan Otoritas Palestina (Palestina Authority). Palestina tidak bisa dipisahkan dari identitas Arab Islam yang membuat Mesir secara umum tetap mendukung perjuangan kemerdekaan negara tersebut. Penduduk negara Palestina memiliki kedekatan historis dengan penduduk Mesir baik secara sosial, politik, maupun hubungan ekonomi, Mesir sempat mengawasi wilayah Palestina sebelum akhirnya Israel menduduki Palestina yang dimulai sejak tahun 1967. Dinamika hubungan Mesir-Palestina juga telah melibatkan banyak pihak, terutama dari Ikhwanul Muslimin yang secara konsisten mendukung usaha kemerdekaan Palestina.

Pada masa Gamal Abdul Nasser, Isu pembebasan tanah Arab Palestina menjadi salah satu sasaran politik luar negeri pada masa pemerintahan Gamal Abdul Nasser. Kolonel Gamal Abdul Nasser adalah pendukung kuat untuk kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Nasser adalah pemimpin kelompok anti Inggris yang berasal dari kalangan militer, Nasser berhasil mengukudeta raja Faruq dan menghapus kerajaan yang sebelumnya menguasai Mesir. Nasser kemudian mendirikan negara Mesir yang berbentuk Republik yang semula dilatarbelakangi revolusi Mesir tahun 1952.

Sejarah hubungan antara Mesir dan Palestina dimulai setelah revolusi Mesir mulai tahun 1952. Orang-orang Arab Palestina menganggap Gamal Abdul Nasser adalah orang yang bisa mengalahkan Israel sehingga mereka menaruh simpati dan mendukung Gamal Abdul Nasser. Selama KTT Liga Arab pada bulan Januari 1964, Nasser memutuskan untuk mendirikan sebuah organisasi sebagai perwakilan dari rakyat Palestina. Kemudian pada bulan Mei 1964 terbentuklah Palestinian Liberation Organization (PLO) atau Organisasi Pembebasan Palestina yang mewadahi berbagai faksi yang ada di Palestina. PLO mendapat dukungan besar dari Nasser.

Setelah pemimpin Nasser meninggal, Muhammad Anwar Al-Sadat kemudian menjadi pemimpin Mesir, sebelumnya Anwar Sadat berposisi sebagai wakil presiden mendampingi Nasser. Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat menunjukkan arah sikap politik luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, Anwar Sadat menunjukkan sikap politik luar negeri yang inferior terhadap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat. Anwar Sadat telah menjadikan Palestina memiliki posisi tawar yang lemah dan lebih mengupayakan upaya-upaya diplomatis walau kemudian dianggap gagal bagi dunia Arab dan Islam.

Dalam masa Sadat, peperangan dengan Israel tetap berlanjut namun pada beberapa tahun

setelah Sadat menjabat, urusan dengan Israel telah didekatkan dengan berbagai upaya kerja sama. Di masa Sadat, peperangan yang pernah berlangsung antara Mesir dengan Israel adalah Perang Kippur di tahun 1973, Yom Kippur adalah hari paling suci bagi orang Yahudi, dan di hari tersebut Mesir dan Suriah melakukan serangan, perang ini tidak menambah atau mengurangi wilayah yang diklaim Israel sejak tahun 1967.

Kekuasaan Anwar Sadat berakhir tahun 1981 ketika ia ditembak oleh Asy-Syahid Khalid Al-Islambuli pemimpin misterius yang disebut-sebut berafiliasi kepada Jamaah Islamiyah dan Al Jihad, sebuah organisasi jihadi yang awalnya berkembang di Mesir. Kekosongan pemerintahan dimanfaatkan wakil presiden Husni Mubarak. Kebijakan dalam negeri maupun luar negeri pada masa Mubarak tidak banyak berbeda dari pendahulunya. Husni Mubarak, dalam isu Palestina secara umum hanya melanjutkan proses damai dan menunjukkan sikap kooperatif dengan Israel. Namun, pada akhirnya pada masa kepemimpinan Husni Mubarak inilah Palestina mulai diakui secara resmi dunia internasional yakni pada tanggal 15 November 1988, dan Mesir juga menjadi negara pertama yang mendukung Deklarasi Kemerdekaan Palestina.

Selama hampir tiga puluh tahun Mubarak memimpin Mesir, politik luar negeri terutama yang berkaitan dengan isu Palestina tidak berbeda dari pendahulunya. Mubarak tetap menjaga komitmen perjanjian Camp David, hubungan dengan Israel tetap terjalin walau banyak yang menilai bahwa hubungan itu terjalin cukup dingin terutama jika melihat provokasi yang selalu dilakukan Israel terhadap Palestina yang menumbuhkan simpati terhadap Palestina salah satunya dari Mesir. Mubarak berulang kali mengupayakan adanya pembicaraan damai antara Palestina dan Israel.

Pada tahun 2011 negara-negara Arab mengalami fase pergolakan dan pemberontakan yang dikenal dengan Musim Semi Arab (Arab Spring). Mesir juga merasakan imbas The Arab Spring, di Mesir terjadi demonstrasi besar-besaran yang menuntut mundurnya Husni Mubarak yang telah lima kali berturut-turut memenangi pemilu di Mesir yang dianggap tidak bersih. Kemudian pasca revolusi 2011 terpilihlah Muhammad Mursi sebagai Presiden Mesir melalui pemilu demokratis. Pada masa Muhammad Mursi, Politik luar negeri Mesir untuk Palestina semakin berkembang setelah Mesir berada di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi. Pada tahun 2012 atau ketika Muhammad Mursi memimpin Mesir, perbatasan Mesir dan Palestina kembali dibuka, dan rakyat Palestina diizinkan untuk memasuki Mesir tanpa visa. Sembari membela hak-hak rakyat Palestina, Mesir dengan dukungan pihak pertahanan terus mengkritik operasi militer yang dilakukan 29 November 2012, Mesir juga mendukung Palestina menjadi anggota PBB dengan upaya voting United Nations General Assembly resolution 67/19. Keputusan resolusi tersebut menjadikan Palestina sebagai salah satu peninjau non-anggota di PBB, posisi tersebut sama seperti Vatikan. Dibuka Dibukanya kembali perbatasan Rafah menunjukkan keberhasilan kebijakan luar negeri Mursi, karena dianggap lepas dari tekanan Israel.

Dibukanya kembali perbatasan memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1.5 juta orang mendapatkan akses ke dunia yang lebih luas, karena selama ini mereka merasa di blokade oleh Israel dan dihalang halangi oleh Mesir. Terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di The National, UEA, menunjukkan adanya gap antara Mesir dan Israel, dan menunjukkan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan Israel.

Politik domestik Mesir mengalami kekisruhan di tahun 2013 yang menyebabkan Mursi harus mundur dari jabatan. Turunnya Mursi dari presiden menyebabkan militer kembali berkuasa di Mesir. Perubahan politik domestik ini kemudian mempengaruhi urusan luar negeri Mesir seperti isu Palestina. November 2012, Mesir juga mendukung Palestina menjadi anggota PBB dengan upaya voting United Nations General Assembly resolution 67/19. Keputusan resolusi tersebut menjadikan Palestina sebagai salah satu peninjau non-anggota di PBB, posisi tersebut sama seperti Vatikan. Dibukanya kembali perbatasan Rafah menunjukkan keberhasilan kebijakan luar negeri Mursi, karena dianggap lepas dari tekanan Israel. Dibukanya kembali perbatasan memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1.5 juta orang mendapatkan akses ke dunia yang lebih luas, karena selama ini mereka merasa di blokade oleh Israel dan dihalang-halangi oleh Mesir. Terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di The National, UEA, menunjukkan adanya gap antara Mesir dan Israel, dan menunjukkan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan Israel.

Masyarakat Palestina terutama Gaza menyadari bahwa mereka menaruh harapan yang besar pada Mursi, yang akan lebih simpati dengan mereka, dan memiliki kedekatan ideologis dengan organisasi nomor satu di Gaza, HAMAS. Diakui Mesir, bahwa pembukaan perbatasan Rafah belum mengakhiri blokade terhadap Gaza, namun ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Politik domestik Mesir mengalami kekisruhan di tahun 2013 yang menyebabkan Mursi harus mundur dari jabatan. Turunnya Mursi dari presiden menyebabkan militer kembali berkuasa di Mesir.

Perubahan politik domestik ini kemudian mempengaruhi urusan luar negeri Mesir seperti isu Palestina. Tak lama setelah penggulingan Mursi pada 3 Juli 2013, militer kembali menutup perbatasan Rafah, dengan alasan terjadi penembakan terhadap 20 orang polisi di dekat perbatasan dan pelakunya diduga dari militan HAMAS. Peristiwa ini menjadi perhatian karena selama masa Mursi memimpin, perbatasan Rafah dilewati 1200 orang tiap harinya. Penutupan kembali perbatasan Rafah diduga dipengaruhi pihak lain terutama Israel, dan HAMAS memiliki hubungan tidak baik dengan pemerintahan Mesir yang berasal dari latar belakang militer.

### **1.3 Pengaruh Ikhwanul Muslimin dalam Konflik Israel Palestina**

Dinamika politik di Palestina telah didominasi oleh satu aktor selama 30 tahun terakhir, yakni Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul Muslimin di Palestina lebih sering disebut sebagai Hamas dan lebih dikenal dengan nama itu. Kepopuleran Hamas di Palestina menyebabkan ada stigma yang menganggap bahwa Hamas adalah satu-satunya sayap Ikhwanul Muslimin di seluruh dunia yang memiliki otoritas dan kekuasaan politik. Perkembangan Ikhwanul Muslimin di Palestina tidak terlepas dari pemimpin kharismaniknya yang terbunuh oleh serangan Israel yakni Ahmad Yassin pada tahun 2004. Ikhwanul Muslimin pertama kali mendirikan perwakilannya di Jerusalem pada 1935.

Dengan bantuan dan bimbingan organisasi induk Ikhwanul Muslimin di Mesir akhirnya terjadi pendirian perwakilan di beberapa kota Palestina lainnya pada 1947, keanggotaan Ikhwan di kota-kota Palestina sebanyak 12.000-20.000 orang. Sebelum bernama Hamas, kelompok Islam ini adalah pasukan paramiliter yang ada dibawah komando Angkatan Bersenjata Mesir. Namun pada 1950-an Ikhwanul Muslimin Palestina mengorganisasi aksi-aksi gerilya mewakili Mesir dalam melawan Israel. Pembentukan Hamas secara resmi terjadi pada 1987 ketika intifada pertama kali terjadi, Ikhwanul Muslimin Palestina melepaskan seluruh jaringan dan anggota untuk dileburkan

menjadi satu dengan Hamas. Konflik dengan Israel semakin meningkat dengan kuatnya Hamas di Palestina utamanya setelah melebur bersama Ikhwanul Muslimin Palestina.

Pada 1988 Hamas merespon draft deklarasi kemerdekaan Palestina oleh PLO dengan menolak tunduk pada Israel dan akan melawan seluruh bentuk pendudukan Israel di tanah Palestina, selain itu Hamas, juga menyatakan bahwa seluruh negosiasi dengan Israel dan intitusi internasional illegal dan tidak berlaku lagi. Otoritas Palestina adalah hasil dari Kesepakatan Oslo, yang mengamanatkan agar terbentuk suatu otoritas di wilayah Palestina. Setelah terbentuk Otoritas Palestina, Fatah kemudian menjadi sayap politik dan kekuatan militer yang paling dominan di Tepi Barat bahkan Gaza. Namun Gaza tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Hamas dan menjadi pusat bagi Yasser Arafat untuk mengembangkan rezim barunya di Gaza. Gaza kemudian menjadi wilayah yang signifikan sebagai poros utama oposisi dalam dinamika politik di Otoritas Palestina. Gaza kemudian juga menjadi pusat bagi Hamas untuk melancarkan serangan-serangan yang sporadis terhadap Israel. Respon Israel meningkat pada 1996 dan mulai menargetkan Hamas bersama Jihad Islam sebagai sasaran yang sangat vital. Israel kemudian menargetkan Hamas sebagai "terroris" bukan lagi sebagai gerakan sayap dari Ikhwanul Muslimin.

Pada tahun 2000 mulai terjadi penurunan intensitas konflik antara Otoritas Palestina dengan Israel. Penurunan intensitas konflik ini terjadi diakibatkan kondisi ekonomi Israel dan Palestina yang sangat buruk akibat konflik berkepanjangan. Lebih khusus lagi, karena tingginya intensitas "terror" di wilayah Israel-Palestina mengakibatkan Israel memperketat masuknya buruh Palestina ke Israel dan itu berdampak pada proses produksi di Israel. Keadaan ini membuat kebuntuan di pihak Hamas. Kebuntuan yang terjadi berakibat pada stagnasi dalam aksi konfrontasi terhadap Israel. Pada akhirnya pelemahan kontrol oleh Hamas. Peran yang sangat signifikan muncul dari Ikhwanul Muslimin dalam mengatasi kebuntuan ini. Posisi geo-strategis yang penting memaksa Hamas untuk patuh dan mempertimbangkan posisi Ikhwanul Muslimin, terlebih

Ikhwanul Muslimin di Mesir. Selain itu, besarnya sayap-sayap organisasi Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah adalah modal utama Hamas untuk mendapatkan legitimasi atas dominasi politik di Otoritas Palestina. Ketergantungan Hamas terhadap Ikhwanul Muslimin di Mesir semakin signifikan setelah secara politik Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilu legislatif di Mesir dan hal itu membuat bantuan serta dukungan politik dan materiil dapat diberikan kepada Hamas secara tegas dan lebih besar lagi. Kekuasaan Mesir atas Rafah menjadi kunci bagi Ikhwanul Muslimin untuk terus mengontrol Hamas. Rafah adalah satu-satunya pintu bagi Gaza untuk terhubung dengan negara-negara Arab lain dan pintu masuk bagi bantuan internasional, dan Hamas sangat tergantung dengan bantuan internasional. Selain itu, Rafah juga pintu masuk dan keluar bagi warga Gaza yang aman dari intimidasi IDF.

Secara ideologis Ikhwanul Muslimin merupakan afiliasi utama dalam identifikasi diri gerakan Islamis di Palestina. Doktrin Ikhwanul Muslimin menegaskan bahwa sebelum menggunakan kekerasan dalam melawan golongan kafir, peran dakwah sebagai media utama untuk mengembalikan umat kembali ke jalan yang benar adalah yang utama. Hamas lebih berfokus pada aksi-aksi konfrontatif yang tegas dengan Israel, hal inilah yang menjadi pembeda antara Hamas dengan sayap Ikhwanul Muslimin lainnya di Timur Tengah. Bagaimanapun juga Hamas tidak sepenuhnya berbeda dengan Ikhwanul Muslimin, Hamas juga bukan kelompok pecahan dari Ikhwanul Muslimin melainkan cabang dari Ikhwanul Muslimin di Palestina. Hamas adalah wujud

dari Ikhwanul Muslimin yang memiliki agenda kekerasan yang eksplisit, hal ini berkaitan dengan agenda agenda konfrontasi dengan Israel.

Sejak dibentuknya Hamas, para mantan anggota Ikhwanul muslimin dengan gencar melakukan kampanye dan mempopulerkan kekerasan dalam tindakan aksi-aksi anti-Israel, tentu saja dengan menggunakan ketaatan atau iman terhadap Islam usaha ini sangat sukses. Dengan menggunakan nama Hamas, organisasi ini bebas melakukan aktivitas yang selama ini dilarang oleh Ikhwanul Muslimin serta mengamankan legalitas Ikhwanul Muslimin sebagai new religious movement yang menjunjung tinggi perdamaian. Hamas mengakomodir kekerasan karena kondisi Palestina yang ada dalam kondisi Perang. Doktrin Ikhwanul Muslimin yang ada dalam Risalah Pergerakan oleh Hassan Al Banna menekankan bahwa jihad adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dalam jihad melawan Israel, adalah kewajiban sebagai kader Ikhwanul Muslimin, karena dalam perspektif Al Banna Palestina adalah hak milik orang Palestina kemudian dijajah oleh Inggris, dan kemudian didirikan negara Yahudi disana, ini adalah bentuk dari pendudukan dan penjajahan yang harus dilawan dengan kekerasan.

Sehingga Hamas melaksanakan kekerasan karena memang dalam doktrin Ikhwanul Muslimin yang tertulis di Risalah Pergerakan memerintahkan perlawanan pada Israel dan negara-negara Penjajah dengan menggunakan kekerasan. Hal itulah yang membawa dampak pada faktor internal Hamas, otomatis Hamas menjadi divergen dari prioritas Ikhwanul Muslimin. Namun, eksistensi Hamas dalam hierarki Ikhwanul Muslimin adalah mutlak. Hal ini didukung dengan fakta yang dikemukakan oleh Khaled Mashal yang menyatakan bahwa empat tahun sebelum Hamas terbentuk, Ikhwanul Muslimin Palestina telah menyusun serangan teror. Hamas selalu membina hubungan yang baik dengan pemimpin internal yang ada di wilayah pendudukan Israel dan Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai pemimpin eksternal. Hubungan baik digunakan untuk memperoleh pertimbangan yang matang dan saran yang objektif dari berbagai pihak yang berkepentingan di Palestina.

Salah satu titik penting hubungan yang terjalin antara Ikhwanul Muslimin di Palestina dengan Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah pertemuan yang terjadi pada 1983 yang memutuskan untuk membentuk sebuah proyek Islam Palestina untuk mempersiapkan segala persyaratan dalam pencapaian keuksesan pergerakan di Palestina. Selain itu aktivitas rekrutmen yang dilakukan oleh Hamas selalu menggunakan pengaruh kuat Ikhwanul Muslimin di media, politik dan peran finansial. Peran penting Ikhwanul Muslimin Mesir dalam konflik Israel-Palestina terjadi setelah pembentukan negara Israel pada 1948, ketika Ikhwanul Muslimin gencar membuka kerjasama dengan negara lain utamanya Kerajaan Yordania. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penguasaan Tepi Barat tanpa ada konflik dan pertumpahan darah dengan tujuan memberikan eksistensi pada usaha pembentukan negara Palestina.

Pada akhirnya aktivitas Ikhwanul Muslimin di Tepi Barat tidak mengedepankan politik melainkan lebih kepada aktivitas sosial dan religius. Pada 1973 Al-Mujamma Al-Islami didirikan oleh Ahmad Yassin di Gaza. Yassin adalah seorang tokoh kharismatik Hamas yang menjadi kekuatan utama pendukung Hamas, beliau adalah seorang pengkhotbah dan pengungsi Palestina pada tahun 1948. Dari latar belakang inilah Yassin banyak berperan dalam mempopulerkan Hamas sebagai gerakan Islam utama di Palestina.

#### **1.4 Pengaruh Ikhwanul Muslimin terhadap Perubahan Politik Luar Negeri Mesir**

Ketidakpuasan masyarakat pada kepemimpinan Presiden Mubarak membawa pengaruh pada terjadinya revolusi Mesir dan turunnya Presiden Mubarak. Dengan menguasai pos-pos penting dalam pemerintahan, Ikhwanul Muslimin membangun legitimasi politik yang akan sangat menentukan dalam proses perumusan politik luar negeri Mesir. Politik luar negeri Mesir setelah revolusi kemudian difokuskan pada satu orang pengambil keputusan yaitu Presiden. Sedangkan Presiden terpilih adalah kader Ikhwanul Muslimin, maka secara organisasional peran Ikhwanul Muslimin secara eksklusif dapat memberikan arahan dan petunjuk bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Namun, selain itu identitas keagamaan yang dibawa oleh Ikhwanul Muslimin kemudian menguatkan basis massa yang masif dan loyal.

Basis massa ini memberikan kontribusi pada pengambil keputusan bahwa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Morsi kemudian berkonsentrasi pada pembuatan bentuk baru dalam politik luar negeri Mesir yang berkomitmen untuk memperkuat peran Mesir secara geo-strategis di Timur Tengah, Afrika dan secara internasional. Sedangkan dengan negara Barat, Presiden Morsi tidak terlalu memberikan perhatian khusus. Presiden Morsi hanya melihat bahwa hubungan Mesir dan negara Barat adalah hubungan yang rasional dan saling menguntungkan. Walaupun interaksi telah dilakukan oleh Presiden Morsi, tidak ada urgensi terhadap kepentingan tertentu dengan negara Barat.

Namun yang perlu digarisbawahi bahwa hubungan luar negeri Mesir dengan negara Barat pada saat Presiden Morsi berkuasa telah mengalami penurunan intensitas. Hubungan ini kemudian hanya berada pada ranah yang konstruktif, karena kedua belah pihak memandang bahwa ada keterkaitan dengan dukungan negara Barat terhadap ekonomi Mesir. Yang menonjol dari politik luar negeri Mesir dibawah Ikhwanul Muslimin adalah normalisasi hubungan dengan negara-negara Timur Tengah yang selama ini terkonstruksi bahwa hubungannya kurang begitu baik. Seperti kunjungan Presiden Morsi ke Arab Saudi dan Iran. Kunjuangan ini merupakan bentuk dari normalisasi hubungan yang dilakukan oleh Mesir kepada negara-negara Timur Tengah yang dominan. Mesir juga berperan aktif dalam mencari solusi damai dalam konflik Suriah, Mesir bahkan menginisiasi banyak solusi agar konflik tidak berkepanjangan.

Terbentuknya komisi tiga negara yang fokus untuk mencari solusi damai di Suriah diinisiasi oleh Mesir dengan melibatkan Turki dan Iran. Ini adalah sebuah langkah yang sangat persuasif dalam menunjukkan pola baru dalam politik luar negeri Mesir. Perhatian yang luar biasa besar diberikan oleh Presiden Morsi terhadap eskalasi konflik Israel-Palestina. Setelah serangan Israel ke Gaza pada November 2012, Morsi memberikan tendensi pada kejadian ini. Morsi memanggil Duta Besar Mesir di Palestina dan Israel untuk berkonsultasi dengan Liga Arab, dan menghasilkan keputusan untuk mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Nabil Al Arabi.

Presiden Morsi dihadapkan pada proses yang paling menentukan dalam menunjukkan perubahan politik luar negeri Mesir yakni merespon ketegangan pertama dengan Israel dalam masa pemerintahannya. Posisi ini kemudian yang memaksa Mesir untuk lebih memihak pada Palestina dan membuktikan bahwa Mesir merupakan aktor yang sangat independen dalam menentukan sikap keberpihakan pada konflik Israel-Palestina. Melihat perkembangan Ikhwanul Muslimin setelah revolusi, telah ditentukan bahwa fokus Ikhwanul Muslimin akan cenderung pada

keamanan Timur Tengah. Kemanan Timur Tengah yang dimaksud adalah aksi-aksi preventif yang dilakukan oleh Israel dan intervensi Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina.

Sejak tahun 2005 Ikhwanul Muslimin sangat berkonsentrasi pada konflik Israel-Palestina, konsentrasi ini digunakan untuk memobilisasi opini komunitas Islam dan negaranegara Arab untuk melawan segala aksi dan program Israel dalam rangka menguasai Palestina. Selain memobilisasi opini, Ikhwanul Muslimin juga ingin merestorasi entitas internasional bangsa-bangsa Muslim yang selama ini tidak bersatu. Ikhwanul Muslimin melihat bahwa Israel adalah pihak yang bersalah dalam konflik Israel-Palestina. Israel dikatakan sebagai pelaksana proyek hegemoni dan globalisasi barbarian.

Sehingga dari pandangan fundamental ini, Ikhwanul Muslimin membangun landasan-landasan perlawanan termasuk juga kekuatan perlawanan. Ide perlawanan ini dikembangkan dari solidaritas keagamaan yang sangat populer dalam masyarakat Islam dan juga konsensus antar elite yang terdiri dari tokoh dan ulama.<sup>186</sup> Perlawanan yang dibangun oleh Ikhwanul Muslimin ini memiliki tujuan yang sangat radikal yakni menginginkan adanya reformasi pemerintahan dan ekonomi. Cara-cara yang ditempuh kemudian memperlihatkan bahwa Ikhwanul Muslimin tidak sama dengan pergerakan Islam yang lain. Sebagai new religious movement Ikhwanul Muslimin masih menempuh cara-cara yang terbuka dengan negara-negara Barat.

Ikhwanul Muslimin masih menjaga hubungan yang seimbang dengan Amerika Serikat dan Eropa sambil berusaha meyakinkan bahwa penarikan dukungan militer serta dukungan lain untuk Israel adalah salah satu hal yang dapat mewujudkan perdamaian di wilayah Israel-Palestina. Selain itu, Ikhwanul Muslimin juga berusaha untuk 'mengetuk hati' negara-negara Eropa karena telah mengirimkan proyek Zionisme ke negara Palestina yang damai di waktu yang lampau. Usaha-usaha persuasif ini menunjukkan bahwa Ikhwan memang memiliki tendensi khusus terhadap konflik Israel-Palestina. Sehingga setelah kekuasaan Mesir dapat diambil oleh Ikhwanul Muslimin, tentu cara-cara persuasif semacam ini akan sering dilakukan oleh Presiden Morsi. Termasuk membina stabilitas hubungan dengan Amerika Serikat, Eropa dan Israel.

### **1.5 Politik Luar Negeri Mesir dalam konflik Israel Palestina**

Dalam melakukan aksinya Ikhwanul Muslimin sangat mengedepankan ajaran agama yang utamanya berkaitan dengan isu-isu politik religius. Dalam hal ini secara spesifik Hassan Al Banna memberikan tendensi pada konflik Israel-Palestina. Pandangan Hassan Al Banna mengenai kontelasi politik Afrika dan Timur Tengah dimulai dengan dampak dari Perang Dunia I tahun 1914-1918 terhadap Afrika dan Timur tengah serta masyarakat Islam pada umumnya. Al Banna melihat bahwa keruntuhan Khilafah Islamiyah di Turki adalah pintu masuk bagi imperialisme negara Barat pada masyarakat Islam. Al Banna juga menggarisbawahi bahwa aksi-aksi Ikhwanul Muslimin harus berkonsentrasi pada perlawanan atas imperialisme ini.

Al Banna mengatakan bahwa adanya imperialisme Barat yang merupakan sebuah agenda untuk menghabisi Islam sebagai agama, kultur dan identitas masyarakat di Afrika dan Timur Tengah. Dalam kaitanya dengan konflik Israel-Palestina Al Banna memberikan uraian bahwa, Palestina adalah wilayah okupasi Inggris. Inggris berperan aktif dalam pembentukan negara Zionis-Yahudi di Palestina. Kerangka pemikiran ini kemudian membentuk suatu ideologi bahwa pendirian negara Israel adalah kesalahan, dan Ikhwanul Muslimin harus ada di barisan terdepan untuk melawan pengingkaran ini. Karena ini bersifat dogmatis dan permanen maka, secara persuasif

maupun prefentif perlawanan Ikhwanul Muslimin akan bersifat mutlak. Dalam konflik Israel-Palestina Ikhwanul Muslimin melihat Israel hanya sebagai alat bagi negara Barat untuk menghancurkan Islam.

Hal ini membawa Ikhwanul Muslimin berseberangan dengan PLO dan Fatah. PLO sebagai payung organisasi pembebasan Palestina mengembangkan ide nasionalisme sekuler sedangkan Fatah lebih mendahulukan untuk membebaskan Palestina kemudian membangun komitmen ideologis. Bagi Ikhwanul Muslimin ide nasionalisme sekuler yang kembangkan PLO merupakan sebuah ide yang utopis dan sebuah pergeseran dari paham Islamisme yang mengedepankan ajaran agama Islam sebagai pondasi utama. Selain itu dalam memandang ide pembebasan Palestina oleh Fatah, Ikhwanul Muslimin berpandangan bahwa tidak dimungkinkan akan ada pembebasan tanpa adanya komitmen terhadap agama Islam yang nantinya akan menginisiasi persiapan masyarakat Palestina secara ideologis, spritual dan psikologis serta hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan.

Ikhwanul Muslimin memang memiliki sebuah grand strategy, yakni dengan memobilisasi massa dengan agama sebagai faktor ideologis yang sangat mengikat individu. Dengan memanfaatkan agama, Ikhwanul Muslimin yakin akan mempunyai kekuatan pejuang Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Namun ide mempersatukan entitas Islam ini mempunyai banyak tantangan dan hambatan sehingga pada 1980-an, Ikhwanul Muslimin mengalami stagnasi. Stagnasi ini yang kemudian membuat Ikhwanul Muslimin bertransformasi pada bentuk new religious movement. Transformasi ini pada akhirnya membuat Ikhwanul Muslimin semakin modern dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi pergerakan politik suatu negara.

Hassan Al Banna bahkan berandai jika Ikhwanul Muslimin memiliki sebuah negara yang memiliki pemerintahan Islam, maka niscaya akan terwujud tujuan untuk menegakkan Islam di seluruh dunia. Menjadi sangat penting untuk Ikhwanul Muslimin terlibat dalam proses politik guna mencapai tujuan-tujuan oranisasi. Dengan dilandasi kerangka berpikir yang sedemikian rupa, Ikhwanul Muslimin kemudian sangat berkonsentrasi pada proses politik di masing-masing negara. Mesir adalah pusat pertumbuhan Ikhwanul Muslimin, gerakan ini juga dilahirkan disana maka, menjadi penting bagi Ikhwanul Muslimin untuk terlibat dalam proses politik di Mesir.

Sejak era pemerintahan Presiden Sadat dan Presiden Mubarak, Ikhwanul Muslimin menjadi kekuatan oposisi yang sangat kuat. Dan setelah ada kesempatan untuk melaksanakan suksesi, Ikhwan kemudian menjadi barisan terdepan. Instrumen agama yang digunakan Ikhwanul Muslimin untuk melaksanakan aksi dan tujuannya adalah elemen yang paling krusial dalam politik luar negeri. Agama kemudian diberikan tempat untuk memberikan konstruksi pada masyarakat bahwa kebijakan yang diambil adalah sebuah kebaikan atau kebenaran. Penilaian masyarakat akan sangat penting bagi berlangsungnya proses pengambilan keputusan karena hal ini berkaitan dengan legitimasi. Legitimasi yang didasarkan pada dogma dan ajaran agama akan mengikat secara sosial, karena masyarakat akan sangat patuh terhadap nilai-nilai agama. Agama kemudian menjadi instrumen yang sangat berpengaruh dalam stabilitas politik domestik. Agama akan menjadi jaminan bahwa kebenaran memihak para pengambil keputusan, dan akan mengkonstruksikan bahwa pengambil keputusan mengambil keputusan berdasarkan petunjuk dari Tuhan.

Tradisi keagamaan kemudian mengafirmasi bahwa keputusan yang dibuat telah diberkati jika pengambil keputusan mendasarkan keputusannya pada nilai-nilai agama. Pada kenyataannya agama juga memiliki massa yang masif dan permanen, hal ini juga dapat memberikan stabilitas

politik. Stabilitas politik akan menjadi indikator bagi legitimasi yang diberikan masyarakat pada pengambil keputusan.

Determinasi Presiden Morsi sebagai pengambil keputusan di Mesir akan sangat tergantung dengan Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul muslimin adalah aktor yang memeberikan dukungan sosial bagi Presiden Morsi. Dukungan sosial yang diberikan Ikhwanul Muslimin akan diberikan kepada Presiden Morsi jika kebijakan Presiden Morsi sejalan dengan tujuan dan kepentingan Ikhwanul Muslimin Kompetisi politik yang diikuti oleh Presiden Morsi dengan Ikhwanul Muslimin akan menghasilkan sebuah kesepakatan politik mengenai distribusi kekuasaan strategis.

Dengan kesepakatan ini, Ikhwanul Muslimin akan menepatkan kader-kadernya berada dalam lingkaran pengambil keputusan. Secara sistemik, distribusi kekuasaan ini akan melahirkan sebuah kelompok pengambil keputusan, Sehingga dalam proses perumusan keput usan akan selalu melibatkan kelompok-kelompok ini. Dukungan sosial Ikhwanul Muslimin secara otomatis akan diberikan pada Presiden Morsi karena kelompok penguasa yang berpengaruh berasal dari Ikhwanul Muslimin. Hal ini memastikan bahwa seluruh keputusan akan sejalan dengan tujuan organisasi. Faktor yang mempengaruhi dalam politik luar neger Mesir selain Ikhwanul Muslimin adalah Perjanjian Camp David.

Perjanjian Camp David adalah sebuah faktor yang mengikat Mesir untuk selalu patuh pada Amerika Serikat dan selalu menjaga stabilitas hubungan dengan Israel. Sejak ada perjanjian Camp David, banyak negara-negara Arab kecewa dengan Mesir. Disamping karena tunduknya Mesir dengan Israel dan Barat, Mesir juga mengakui Israel sebagai negara. Walaupun pada dasarnya kerangka yang berusaha dibangun dalam Camp David adalah perdamaian namun, hal ini sangat mencederai esensi dari perjuangan negara Arab dalam konflik Israel-Palestina. Presiden Sadat sebagai representasi Mesir telah menyetujui perjanjian Camp David dan ini akan membawa sebuah konsekuensi besar terhadap politik luar negeri Mesir. Mesir harus memberikan jaminan hak-hak internasional kepada Israel dan mengembalikan tanah-tanah Israel yang telah diduduki oleh angkatan bersenjata Mesir.

Kesepahaman yang essensial dalam perjanjian Camp David adalah saling memberikan pengakuan bagi masing-masing pihak yang bertentangan. Dengan memberikan pengakuan pada kepentingan masing-masing diharapkan adanya sikap toleransi dan saling menghargai. Perjanjian ini juga menegaskan bahwa masing-masing pihak harus menjaga stabilitas perdamaian Timur Tengah. Sehingga masing-masing pihak diharapkan menarik seluruh angkatan bersenjatanya di wilayah-wilayah yang telah disepakati. Israel menarik pasukanya di Semenanjung Sinai dan Mesir juga menarik pasukanya di Dataran Tinggi Golan. Selain itu, Mesir juga diharuskan membuka blokade Terusan Suez, karena hal ini dipandang merugikan banyak pihak. Mesir tidak diperkenankan memblokade kapal-kapal Israel dan Mesir juga harus memberikan kebebasan pada kapal-kapal Amerika Serikat dan Eropa untuk menggunakan akses Terusan Suez.

Dari kesepakatan ini hubungan baik antara Israel dan Amerika Serikat terbina hingga sekarang. Perjanjian ini membawa dampak pagi depedensi politik luar negeri Mesir khususnya dalam konflik Israel-Palestina. Sejak terikat dengan perjanjian ini Mesir semakin kekurangan ruang untuk memperjuangkan nasib rakyat Palestina yang terjebak okupasi Israel di Tepi Barat dan Gaza. Mesir menjadi tidak tegas dan konsisten dalam konflik Israel-Palestina.

Walaupun pada dasarnya Mesir tidak menyetujui pendudukan Israel atas Gaza, Tepi Barat

dan Jerusalem Timur, namun Mesir tidak bisa berbuat banyak untuk menunjukkan ketidaksepatannya. Selain itu, Mesir juga sangat bersikukuh untuk mengusir Israel dari Dataran Tinggi Golan yang menjadi wilayah Suriah. Sikap Mesir yang sangat keras ini tidak diimbangi dengan aksi-aksi yang realistis, sehingga hanya menjadi wacana di media massa dan para elite politik saja. Mesir cenderung diam dan tidak pernah secara tegas menyampaikan kepentingannya kepada Israel.

Hal ini terjadi akibat dari intervensi Amerika Serikat yang begitu kuat terhadap konflik Israel-Palestina. Ditambah dengan ketergantungan Mesir terhadap Amerika Serikat dalam sektor ekonomi dan militer, hal ini semakin membuat Mesir tidak bisa melakukan aksi-aksi yang tegas dalam konflik Israel-Palestina. Keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik Israel-Palestina adalah sebuah tendensi yang sangat condong ke Israel dan ini membuat Mesir tidak bisa melakukan hal-hal yang reaksioner.

*"The adoption of the resolution by an enormous majority showed the international community's recognition of the right of Palestine to have a Government and a territory with secure borders, in spite of the occupation and the occupying Power's continuing acquisition of territory. The international community had affirmed that it was able to take the "right decision" when political will was present. He hoped that, in the near future, the Security Council would be able to undertake its responsibility through a similar decision, making Palestine a full Member State of the United Nations."*

Dalam pemberian status observer pada negara Palestina yang terdapat dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 67/19, Mesir memberikan dukungan yang sangat tegas. Dukungan ini merupakan titik balik dari keberpihakan Mesir dalam konflik Israel-Palestina. Dengan mendukung pembentukan negara Palestina maka Mesir telah secara tegas merubah politik luar negerinya yang selama ini menjadi aktor kunci dalam implementasi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Mendukung Palestina dan melawan Israel sudah menjadi tradisi budaya politik Mesir dan juga menjadi kesepakatan nasional. Namun, semenjak Mesir menandatangani perjanjian Camp David, Presiden Sadat telah membuat Mesir untuk melakukan hal sebaliknya. Mesir harus tunduk pada kesepakatan untuk saling menghormati eksistensi masing-masing negara dan juga menghindari segala bentuk aksi yang provokatif.

Mesir harus menjadi pembela Israel dan mengakui eksistensinya sebagai negara serta menjamin terpenuhinya hak-hak Israel sebagai negara. Selain itu, Mesir juga menjadi alat politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, Mesir dipergunakan sebagai alat legitimasi untuk membenarkan aksi-aksi Amerika Serikat di Timur Tengah. Setelah intifada Al Aqsa pada tahun 2000, politik luar negeri Mesir dipertanyakan oleh warga negaranya, terutama yang berkaitan dengan ketegasan sikap atas konflik Israel-Palestina.

Aksi-aksi protes dan demonstrasi mulai bermunculan sejak tahun 2000. Aksi-aksi ini dipelopori oleh Ikhwanul Muslimin yang sangat tidak setuju dengan sikap Presiden Mubarak yang hanya patuh pada Amerika Serikat. Aksi-aksi yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin ini akhirnya membuat Presiden Mubarak mengendurkan kebijakannya atas blokade jalur Gaza pada tahun 2009. Dengan perjanjian damai antara Israel dan Mesir, ini membuat Mesir melaksanakan reorientasi dalam politik luar negerinya.

Presiden Mubarak mengimplementasikan perjanjian damai antara Mesir dan Israel dengan baik dan tidak memperdulikan aksi-aksi protes yang dilakukan oleh Ikhwanul Muslimin. Ikhwanul

Muslimin sebagai oposisi terkuat Mubarak juga terus mengkonsolidasikan massa dan terus melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap politik luar negeri Mesir yang tidak mendukung Palestina. Karena kekerasan yang digunakan Presiden Mubarak untuk meredam aksi protes Ikhwanul Muslimin, Presiden Mubarak kehilangan popularitasnya di Mesir.

Hilangnya popularitas ini kemudian menyebabkan Mubarak sangat tergantung dengan militer dan Amerika Serikat. Militer kemudian menjadi kekuatan politik yang loyal kepada Presiden Mubarak. Selain itu militer juga menjadi penentu dalam keputusan strategis Presiden Mubarak, termasuk politik luar negeri. Revolusi Mesir yang terjadi kemudian menyuburkan benih-benih sentimen terhadap Israel dan mempopulerkan aktivitas pro-Palestina. Dengan kebijakan Presiden Morsi yang tidak akan mendukung kebijakan pendudukan Israel di Palestina menegaskan bahwa Mesir bukan lagi alat legitimasi bagi Israel dan Amerika Serikat.

Ikhwanul Muslimin melalui Presiden Morsi mulai memfokuskan perhatian pada pembentukan negara Palestina dan restrukturisasi Hamas. Mesir akan membantu segala persiapan dan rekonsiliasi faksi-faksi di Palestina. Hal ini adalah momentum bahwa Ikhwanul Muslimin telah memberi sinyal bahwa perubahan politik luar negeri Mesir akan mengarah pada Palestina. Walaupun Dewan Tinggi Militer Mesir tidak setuju dengan tindakan ini seperti juga Amerika Serikat, Ikhwanul Muslimin tetap pada perubahan politik luar negeri Mesir. Ikhwanul Muslimin melalui Presiden Morsi juga menginisiasi sikap antipati terhadap Israel dan Amerika Serikat dengan mempropagandakan kekerasan Israel yang didukung oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Palestina. Upaya ini dilakukan untuk menarik simpati masyarakat Mesir yang nantinya akan menciptakan legitimasi politik. Kepresidenan Morsi memang membawa banyak mandat dari proyek-proyek Islam, utamanya dalam konflik Israel-Palestina. Dan perkembangan politik luar negeri Mesir kemudian akan sangat responsif terhadap opini publik. Hal ini disebabkan legitimasi yang ingin dibangun oleh Ikhwanul Muslimin haruslah legitimasi publik bukan legitimasi yang dibangun dari ketakutan rakyat.

### **Kesimpulan**

Politik luar negeri Mesir Pasca Perjanjian Camp David 1979 dan setelah kematian Anwar Sadat 1981 dan di gantikan oleh Husni Mubarak adalah tetap membawa arah politik luar negeri Mesir Condong ke Amerika, bukan saja karena desakan ekonomi dalam negeri dan kedekatan ideologis (ideologi liberal), tetapi juga karena desakan situasi, khususnya situasi dunia Arab yang tetap tidak menentu. Hubungan Mesir dan Palestina Hubungan antara Mesir dan Palestina telah terjalin cukup lama dan dinamis. Mesir di bawah kepemimpinan Anwar Sadat menunjukkan arah sikap politik luar negeri yang berbeda dari pendahulunya, Anwar Sadat menunjukkan sikap politik luar negeri yang inferior terhadap Israel dan sekutunya, Amerika Serikat.

Di masa Sadat, peperangan yang pernah berlangsung antara Mesir dengan Israel adalah Perang Kippur di tahun 1973, Yom Kippur adalah hari paling suci bagi orang Yahudi, dan di hari tersebut Mesir dan Suriah melakukan serangan, perang ini tidak menambah atau mengurangi wilayah yang diklaim Israel sejak tahun 1967. Namun, pada masa kepemimpinan Husni Mubarak inilah Palestina diakui secara resmi dunia internasional yakni pada tanggal 15 November 1988, dan Mesir juga menjadi negara pertama yang mendukung Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Mubarak tetap menjaga komitmen perjanjian Camp David, hubungan dengan Israel tetap terjalin walau banyak yang menilai bahwa hubungan itu terjalin cukup dingin terutama jika melihat provokasi

yang selalu dilakukan Israel terhadap kawasan Palestina yang menumbuhkan simpati terhadap Palestina salah satunya dari Mesir.

Dengan terbukanya kembali perbatasan Rafah menurut Alan Phils, penulis harian di The National, UEA, menunjukkan adanya gap antara Mesir dan Israel, dan menunjukkan sinyal bahwa politik luar negeri Mesir telah berubah dan Mesir akan bertindak tanpa harus berkonsultasi dulu dengan Israel. Dibukanya kembali perbatasan memudahkan penduduk Gaza yang berjumlah sekitar 1.5 juta orang mendapatkan akses ke dunia yang lebih luas, karena selama ini mereka merasa di blokade oleh Israel dan dihalang-halangi oleh Mesir. 1988 Hamas merespon draft deklarasi kemerdekaan Palestina oleh PLO dengan menolak tunduk pada Israel dan akan melawan seluruh bentuk pendudukan Israel di tanah Palestina, selain itu Hamas, juga menyatakan bahwa seluruh negosiasi dengan Israel dan intitusi internasional illegal dan tidak berlaku lagi.

Dukungan sosial yang diberikan Ikhwanul Muslimin akan diberikan kepada Presiden Morsi jika kebijakan Presiden Morsi sejalan dengan tujuan dan kepentingan Ikhwanul Muslimin. Kompetisi politik yang diikuti oleh Presiden Morsi dengan Ikhwanul Muslimin akan menghasilkan sebuah kesepakatan politik mengenai distribusi kekuasaan strategis. Ikhwanul Muslimin memberikan peran penting dalam transisi di Mesir dan akhirnya membawa perubahan politik luar negeri yang lebih jelas dan konsisten untuk membela dan mendukung sepenuhnya solusi dua negara bagi konflik Israel-Palestina. Mesir melihat bahwa terbentuknya negara Palestina adalah urgensi yang diperlukan sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Berdasarkan data yang dianalisis maka dapat dikatakan bahwa Ikhwanul Muslimin berpengaruh dalam politik luar negeri Mesir, terutama setelah kemenangannya dalam pemilihan umum. Melalui Presiden Morsi Ikhwanul Muslimin mendukung Palestina dalam resolusi Majelis Umum PBB No. 69/17.

## Referensi

- A.A, Perwita. & Y.M, Yani. 2011. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Abu-Amr, Ziad. Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza: Muslim Brotherhood and Islamic Jihad. Indiana: Indiana University Press. 1994.
- Fahadayna, Adhi Cahya. "PENGARUH IKHWANUL MUSLIMIN TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI MESIR DALAM KONFLIK ISRAEL PAL Nasution, Dahlan.1991.Politik Internasional konsep dan teori. Jakarta: Penerbit Erlangga ESTINA,".
- Ganewaty Wuryandar dkk. 2008. Politik luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Yogyakarta: Pustaka pelajar
- Nurdiassa, Annisa. "DAMPAK KEBIJAKAN REKONSILIASI MESIR TERHADAP ISRAEL DALAM PERJANJIAN CAMP DAVID 1979-1989,".
- Ulum, Misbahul. "PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER 2019,".
- Yumitro, Gonda, dan S Ip. "KUDETA MESIR DAN KONFLIK PALESTINA,".
- Elgindy, Khaled (2012). "Egypt, Israel and Palestine : Prospects for Peace After the Arab Spring" Dalam *cairo review* Vol.6. Diakses <http://www.aucegypt.edu/GAPP/CairoReview/Lists/Articles/Attachment/221/CR6-Elgindy.pdf> (Diakses pada 6 Januari 2023)
- Peranan-Politik-Luar-Negeri-RI-Dalam Percaturan-Internasional. Diakses <http://www.scribd.com/doc/68254972/Peranan-Politik-Luar-Negeri-RI-Dalam-Percaturan-Internasional-6> (Diakses pada 6 Januari 2023)
- Teori-Politik-Luar-Negeri <http://www.docstoc.com/docs/82805440/Teori-Politik-Luar-Negeri> (Diakses pada 6 Januari 2023)